

DOKUMEN PERENCANAAN

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

RENSTRA (REVISI)

Rencana Strategi 2016 - 2021



Pemerintah Kabupaten Bone Bolango

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan Rahmat dan Hidayah-Nya, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango, dapat menyelesaikan Dokumen Revisi Rencana Strategis Tahun 2016-2021 sesuai dengan OPD Baru Nomor : 08 tahun 2016.

Dokumen Rencana Strategis ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 guna pemaparan gambaran dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bone Bolango lingkup kebijakan (**urusan wajib**), setelah me-*reviuw* kembali capaian kinerja pada RPJMD 5 (lima) tahun sebelumnya (2016-2021), yang akan dijadikan panduan dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bone Bolango. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango ini merupakan penjabaran dari RPJMD (Rencana Pembangunan Menengah Daerah) Kabupaten Bone Bolango yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 06 Tahun 2016.

Kemudian dokumen Perencanaan ini tentu masih terdapat kekurangan, sehingga dibutuhkan koreksi dan masukan dalam penyempurnaan dokumen Rencana Strategis ini.

Dan akhirnya kami berharap agar Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango 2016-2020 ini menjadi dokumen Perencanaan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango 2016-2021 yang lebih baik dan dapat menjaga kesinambungan pembangunan daerah (pembangunan yang berkelanjutan), menuju

terwujudnya pembangunan berkelanjutan menuju bone bolango cemerlang 2021.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BONE BOLANGO



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM	3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	7
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	9
BAB II	11
GAMBARAN UMUM SKPD	11
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD.....	11
2.1.1 Tugas Pokok.....	11
2.1.2 Fungsi	11
2.1.3 Susunan Organisasi.....	12
2.1.4 Struktur Organisasi	12
2.2 SUMBER DAYA MANUSIA	34
2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD	37
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD44	
BAB III	46
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	46
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD	46
3.2 TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KDH DAN WAKIL KDH TERPILIH54	

3.3	TELAAH RT RW DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	55
3.5	PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	59
BAB IV		63
VISI MISI, TUJUAN DAN SASARAN, DAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN		63
4.1.	VISI DAN MISI	63
4.1.1	Visi	63
4.1.2	Misi	64
4.2.	TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD	64
BAB V		67
5.1	STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD	67
5.1.1.	Strategi	67
5.1.2.	Kebijakan	67
BAB VI		71
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF		71
6.1	Rencana Program dan Kegiatan	71
6.2	Indikator Program dan Kegiatan	72
BAB VII		71
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN		80
BAB VIII PENUTUP		86

DAFTAR TABEL

TABEL 2. 1 SUMBER DAYA MANUSIA SESUAI ESELON	34
TABEL 2. 2 JUMLAH PEGAWAI SESUAI GOLONGAN/PANGKAT	35
TABEL 2. 3 JUMLAH PEGAWAI SESUAI TINGKAT PENDIDIKAN.....	36
TABEL 2. 4 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	37
TABEL 2. 5 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN SKPD DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	38
TABEL 3. 1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD...	47
TABEL 3. 2 IDENTIFIKASI ISU-ISU STRATEGIS (LINGKUNGAN EKSTERNAL).....	52
TABEL 3. 3 PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD BERDASARKAN TELAHAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH BESERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG KEBERHASILAN PENANGANANNYA.....	57
TABEL 3. 4 PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD BERDASARKAN ANALISIS KLHS BESERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG KEBERHASILAN PENANGANANNYA.....	58
TABEL 4. 5 SKOR KRITERIA PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	60
TABEL 4. 6 NILAI SKALA KRITERIA	61
TABEL 4. 7 RATA-RATA SKOR ISU-ISU STRATEGIS.....	
TABEL 5. 1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD	65
TABEL 5. 2 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN	68
TABEL 7. 1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	89

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Perumusan rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, untuk kabupaten/kota mencakup:

1. Pengolahan data dan informasi;
2. Analisis gambaran pelayanan SKPD kabupaten/kota;
3. Review renstra kementerian/lembaga dan renstra SKPD provinsi;
4. Penelaahan rtrw kabupaten/kota;
5. Analisis terhadap dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis (klhs) sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota;
6. Perumusan isu-isu strategis;
7. Perumusan visi dan misi SKPD kabupaten/kota;
8. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD kabupaten/kota;
9. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD kabupaten/kota;
10. Mempelajari surat edaran bupati/walikota perihal penyusunan rancangan renstra SKPD kabupaten/kota beserta lampirannya, yaitu rancangan awal RPJMD Kabupaten/Kota yang memuat

- indikator keluaran program dan pagu per-SKPD kabupaten/kota;
11. Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD kabupaten/kota, guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota;
 12. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan;
 13. Perumusan indikator kinerja SKPD kabupaten/kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota; dan
 14. Pelaksanaan forum SKPD kabupaten/kota.

Pembentukan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango didasarkan pada penggabungan dari 2 Kantor sebagai unit pelaksana teknis daerah, yang didalamnya terdiri dari 3 bidang strategis yaitu bidang penanaman modal, PTSP dan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango ini dibentuk melalui peraturan daerah No.8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang merupakan perubahan dari Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Bone Bolango. Sebagai unsur pendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang penanaman modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah tanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pada tahap Rancangan akhir Renstra SKPD disampaikan kepada DPMPTSP&TK Kabupaten Bone Bolango kepada kepala Bappeda

untuk memperoleh pengesahan Kepala Daerah. Revisi Renstra ini merupakan renstra perubahan dari renstra awal Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Bone Bolango, kemudian dirubah dengan adanya OPD Baru menjadi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Dalam renstra revisi menangani 1 urusan yaitu Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang terdiri dari : Urusan Bidang Penanaman Modal dan Urusan Bidang Tenaga Kerja yang awalnya hanya ada 1 urusan saja yaitu urusan bidang penanaman modal.

Dengan demikian dalam revisi renstra ada program kegiatan yang harus ditambahkan yaitu program kegiatan bidang ketenagakerjaan.

Rancangan akhir Renstra SKPD diverifikasi akhir oleh Bappeda.

Verifikasi akhir sebagaimana dimaksud harus dapat menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan DPMPTSP&TK dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra SKPD lainnya. Selanjutnya Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra SKPD yang telah diteliti melalui verifikasi akhir, untuk diajukan kepada Kepala Daerah guna memperoleh pengesahan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Beberapa aturan yang terkait serta pedoman yang dijadikan acuan dalam rangka penyusunan, perencanaan dan penganggaran SKPD serta penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Boango antara lain undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan yang terdapat pada DPMPTSP&TK, dapat lihat sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RINomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,

- Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 19. Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 20. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja;

26. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 16/MEN/XI/2010 tentang Perencanaan Tenaga Kerja Makro;
27. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 309 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan renstra satuan kerja perangkat daerah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango adalah :

1. Renstra DPMPTSP&TK merupakan Renstra Perubahan dari Renstra Awal Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Bone Bolango.
2. Penyusunan RENSTRA Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja adalah untuk memberikan gambaran tentang kondisi DPMPTSP&TK Kabupaten Bone Bolango.
3. Memberikan gambaran permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya dengan berbagai kendala, tantangan dan peluang
4. Sebagai Panduan bagi seluruh jajaran organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango dalam melaksanakan tugasnya dalam kurun waktu lima Tahun .

Tujuan Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman kepada seluruh jajaran organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango dalam pencapaian Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango;

2. Renstra ini juga sebagai acuan untuk mewujudkan Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja kabupaten bone bolango dalam melaksanakan tugasnya dalam kurun waktu lima tahun
3. Renstra diharapkan dapat memperbaiki kinerja seluruh jajaran organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang benar benar terarah dalam pencapaian hasil dan target pelayanan.
4. Renstra diharapkan dapat dijadikan sebagai tolok ukur kinerja dan evaluasi secara objektif sesuai dengan indicator yang telah ditetapkan.
5. Renstra sebagai landasan operasional dalam penyusunan program kegiatan yang mengacu pada visi dan misi Kabupaten Bone Bolango.
6. Renstra ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD), pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan SKPD, penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Perjanjian Kinerja (PK), dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi.
7. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
8. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan selama lima tahun kedepan (2016 sampai 2020);
9. Sebagai bahan dan tolok ukur dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati tahunan (2016 sampai 2021) dan akhir masa jabatan terutama dalam pelaksanaan tugas urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh DPMPSTP&TK.
10. Memotret situasi ketenagakerjaan saat ini dan dampak Perekonomian terhadap penciptaan kesempatan kerja dengan berbagai

karakteristiknya.

11. Menyusun kebijakan, strategi dan program dalam menangani masalah ketenagakerjaan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika naskah Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango 2016-2021 disusun, sebagai berikut :

1. **BAB I PENDAHULUAN.** Bab ini Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra DPMPTSP&TK, fungsi Renstra DPMPTSP&TK dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra DPMPTSP&TK, keterkaitan Renstra DPMPTSP&TK dengan RPJMD.
2. **BAB II GAMBARAN PELAYANAN.** Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas pokok dan fungsi serta organisasi) DPMPTSP&TK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki DPMPTSP&TK dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra DPMPTSP&TK periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas DPMPTSP&TK yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra DPMPTSP&TK ini.
3. **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD.** yang didalamnya membahas mengenai indentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaah visi, misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih, telaah RT RW dan kajian lingkungan hidup strategis dan penentuan isu-isu strategis.

4. **BAB IV VISI MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**, pada BAB ini menjelaskan mengenai visi dan misi, tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD dan strategi dan kebijakan SKPD.
5. **BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN**. pada bab ini membahas mengenai rencana program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam bentuk tabel.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BONE BOLANGO

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BONE BOLANGO

2.1.1 Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan pelayanan public pada Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas peraturan organisasi dan tata kerja lembaga lain dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango.

2.1.2 Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup dan tugasnya;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup dan tugasnya ;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugasnya ;

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

2.1.3 Susunan Organisasi

1. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, Mensinkronisasikan, Mengharmonisasikan secara terintergrasi serta mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan arah tugas dan fungsi satuan organisasi yang berada dilingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango yang meliputi Penatausahaan administrasi bidang Penanaman Modal, Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bidang Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Hubungan Industrial dan Bidang Peningkatan Kompetensi, Produktifitas dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada public, serta Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsi.

- a. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan kebijakan umum dan kebijakan teknis Penatausahaan administrasi bidang Penanaman Modal, Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bidang Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Hubungan Industrial dan Bidang Peningkatan Kompetensi, Produktifitas dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada public;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan Penatausahaan administrasi bidang Penanaman Modal, Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bidang Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Hubungan Industrial dan Bidang Peningkatan Kompetensi, Produktifitas dan Jaminan Sosial

- Tenaga Kerja untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada public;
- c. Pengkoordinasian penataan dan pelaksanaan teknis operasional Penatausahaan administrasi bidang Penanaman Modal, Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bidang Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Hubungan Industrial dan Bidang Peningkatan Kompetensi, Produktifitas dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada public;
 - d. Pengkoordinasian dan pemimpin kegiatan Penatausahaan administrasi bidang Penanaman Modal, Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bidang Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Hubungan Industrial dan Bidang Peningkatan Kompetensi, Produktifitas dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada public;
 - e. Pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Penatausahaan administrasi bidang Penanaman Modal, Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bidang Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Hubungan Industrial dan Bidang Peningkatan Kompetensi, Produktifitas dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada public;
 - f. Pengkoordinasian penyusunan laporan Penatausahaan administrasi bidang Penanaman Modal, Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bidang Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Hubungan Industrial dan Bidang Peningkatan Kompetensi, Produktifitas dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada public;

- g. Pengkoordinasian penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Penatausahaan administrasi bidang Penanaman Modal, Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bidang Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Hubungan Industrial dan Bidang Peningkatan Kompetensi, Produktifitas dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada public;
- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan kedinasan.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang kesekretariatan yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan program, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta penyusunan laporan tahunan;
- b. Pengkoordinasian, perencanaan, penataan dan pengelolaan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan program, evaluasi dan pelaporan;
- c. Pengkoordinasian pengelolaan dan pengawasan aset dinas;
- d. Pengkoordinasian pengkajian dan penyajian bahan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- e. Pengkoordinasian pelayanan administrasi dilingkungan dinas
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan;
- g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi yang diberikan oleh pimpinan ;

Sekretariat terdiri dari :

A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan kepegawaian serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pengendalian surat menyurat, pengelolaan kearsipan dan ketatausahaan pimpinan;
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi umum untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Menyusun rencana pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan inventaris dan usul penghapusan aset dinas;
- d. Melaksanakan inventarisasi, pemeliharaan dan pemeliharaan dan penatausahaan aset dinas;
- e. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dinas;
- f. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahaan;
- g. Membuat laporan kegiatan pelaksanaan tugas;
- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi yang diberikan oleh pimpinan.

B. Sub Bagian Keuangan

Sub bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan keuangan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Sub bagian keuangan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan urusan administrasi keuangan;
- b. Menyusun rencana penggunaan anggaran berdasarkan usulan kegiatan;
- c. Mencatat, mengolah dan menganalisis data pelaksanaan anggaran;

- d. Meneliti, menguji dan menverifikasi kebenaran administrasi keuangan;
- e. Melaksanakan pembukuan realisasi anggaran sesuai rencana program kerja;
- f. Melaksanakan pembukuan realisasi anggaran sesuai rencana program kerja;
- g. Melaksanakan laporan periodik posisi kas dan penyiapan administrasi keuangan bersama bukti-bukti yang sah;
- h. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
- i. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi yang diberikan oleh pimpinan;

C. Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan penyiapan data dan informasi rencana kerja;
2. Melaksanakan penyusunan rencana kerja strategis, program dan kegiatan tahunan ;
3. Melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas ;
4. Melaksanakan perencanaan kegiatan dalam penyelenggaraan tugas-tugas secara terpadu ;
5. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data perencanaan program, evaluasi dan pelaporan ;
6. Melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan

program dan kegiatan ;

7. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan ;
8. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi yang diberikan oleh pimpinan ;

3. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas Pokok melaksanakan urusan administrasi pelayanan perizinan dan verifikasi serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang fungsi dan tugasnya.

Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

1. Mengkoordinasikan penyusunan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur pelaksanaan kegiatan pelaksanaan administrasi perizinan dan verifikasi ;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pelayanan perizinan meliputi pendaftaran, pengolahan dan penerbitan perizinan ;
3. Mengkoordinasikan pembentukan dan pelaksanaan tugas tim teknis dalam penyelenggaraan perizinan ;
4. Pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan satuan kerja terkait dan / atau pihak ketiga dibidang pelayanan perizinan ;
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan ;
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan peninjauan lapangan terhadap permohonan izin yang disampaikan oleh pemohon ;
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan publikasi standar operasional prosedur proses pelayanan perizinan kepada masyarakat ;
8. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.
9. Melaksanakan Fungsi Penyelesaian Permasalahan Terhadap

Izin Usaha / IMB yang telah dikeluarkan untuk perbaikan serta menyelesaikan permasalahan tentang perizinan dan non perizinan.

10. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

A. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Pengaduan

Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Pengaduan mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Pengaduan mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur pelayanan perizinan ;
2. Pemberian informasi dan formulir yang berkaitan dengan persyaratan perizinan, non perizinan dan pengaduan;
3. Melaksanakan verifikasi berkas persyaratan permohonan perizinan ;
4. Melaksanakan validasi terhadap berkas permohonan perizinan;
5. Mempersiapkan pelaksanaan publikasi standar operasional prosedur proses pelayanan perizinan kepada masyarakat ;
6. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan ;
7. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.
8. Membuat rumusan tentang persyaratan perizinan yang

tidak sesuai dengan peruntukkan usaha atau kegiatan yang dimohonkan dan bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, untuk memberikan penjelasan / penolakan kepada pihak pemohon.

9. Merumuskan permasalahan serta menyelesaikan sengketa terhadap izin dan non perizinan yang bermasalah kepada pihak pemohon ataupun keterkaitannya dengan pihak yang lainnya terhadap objek sengketa dimaksud.
10. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Seksi Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan PTSP

Seksi Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan PTSP mempunyai tugas pokok melaksanakan Pengembangan system TI (Sistem Informasi Teknologi), Penyusunan Database, Pengembangan Sistem Administrasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis online, pengembangan dan peningkatan infrastruktur TI, Penyediaan SDM Khusus menangani infrastruktur dan pengoperasian system komputerisasi dan penyelesaian system pengaduan melalui sms center, e-mail (media social) serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan PTSP mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan penyiapan sistem infrastruktur komputerisasi melalui program pengoperasional system secara terpadu dan membuat penyusunan petunjuk teknis system informasi pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis online ;
2. Membuat database sesuai klasifikasi data dan menyusun program yang terintegrasi dengan system yang ada

disetiap skpd yang berkaitan dengan pelayanan system informasi perizinan dan non perizinan ;

3. Melaksanakan system pengaduan Public melalui TI yang terintegrasi dengan skpd terkait secara teknis dalam memberikan pelayanan data tentang perizinan dan non perizinan;
4. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan ;
5. Melaksanakan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh kepala dinas.
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Seksi Verifikasi dan Administasi Pelayanan

Seksi Verifikasi dan Administrasi pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan Penatausahaan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan dan memverifikasi, Validasi berkas / dokumen serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Verifikasi dan Administrasi Pelayanan mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan Proses Adminsitration secara teknis dan verifikasi, validasi berkas perizinan dan non perizinan ;
2. Melaksanakan Verifikasi tentang data serta memasukkan database melalui system pelayanan informasi perizinan dan non perizinan ;
3. Membentuk Tim Teknis survey lapangan dengan tim teknis dari SKPD terkait;
4. Melaksanakan penerbitan izin dan non perizinan yang berdasarkan ketentuan tentang proses perizinan yang berlaku ;
5. Melaksanakan koordinasi dengan skpd terkait dalam hal

penetapan besaran retribusi dan pajak berdasarkan Perda dan Peraturan yang berlaku ;

6. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan ;
7. Melaksanakan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Penanaman Modal dan Promosi

Bidang Penanaman Modal dan Promosi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan dibidang penanaman modal, promosi dan kerjasama, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, melakukan pengawasan, evaluasi terhadap perkembangan investasi secara berjenjang dan melaporkan atau meneruskan kepada instansi Vertikal (BKPM) serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya dan fungsinya.

Bidang Penanaman Modal dan Promosi mempunyai fungsi :

1. Menyusun program kerja melalui lintas sektoral dan Mengkoordinasikan program BKPM dalam peningkatan investasi di daerah;
2. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur (SOP) penanaman modal dan Promosi ;
3. Menyusun dan Menyiapkan data potensi investasi dari berbagai sector serta mengklasifikasikan data potensi tersebut sebagai skala prioritas promosi unggulan potensi daerah;
4. Membuat Profil Potensi Investasi Daerah dan bekerjasama dengan Badan Promosi Luar Negeri dan Dalam Negeri ;
5. Menyusun Strategi Temu Investor dalam Promosi Potensi Unggulan Daerah Luar Negeri dan Dalam Negeri melalui PMA PMDN ;

6. Melaksanakan promosi investasi melalui kegiatan event bertaraf internasional dan nasional serta melakukan kerjasama dengan para pelaku usaha sesuai bidang potensi investasi yang diminati oleh para pengusaha ;
7. Memberikan kebijakan peluang investasi dengan berbagai regulasi oleh pemerintah daerah kepada para pelaku usaha untuk berinvestasi di daerah sesuai jangka waktu dan kesepakatan serta kerjasama antara kedua belah pihak dalam hal ini pemerintah daerah dan pelaku dunia usaha.
8. Menyusun petunjuk teknis system informasi pelayanan melalui SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik) dan SIPID (Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah) serta system LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang berbasis online.
9. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri terhadap nilai investasi ataupun pengendalian dan penyelesaian pengaduan yang diakibatkan oleh permasalahan yang terjadi pada lingkup perusahaan yang berinvestasi di daerah;
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

A. Seksi Promosi dan Hubungan Kerjasama

Seksi Promosi dan Hubungan Kerjasama mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan promosi dibidang potensi daerah dan kerjasama penanaman modal PMA dan PMDN baik Luar Negeri dan Dalam Negeri serta mendata potensi unggulan dari berbagai sector sekaligus menyusun nilai investasi yang dipromosikan. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Promosi dan Hubungan Kerjasama mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan dan menyusun petunjuk teknis dibidang promosi penanaman modal PMA/PMDN antara lain : membuat profil potensi daerah, Leaflet, Booklet, VCD Profil Potensi, menggunakan/memanfaatkan promosi melalui media cetak dan elektronik dan media social berbasis online ;
2. Melaksanakan kerjasama atau nota kesepahaman (MOU) dengan pihak pelaku usaha baik dalam negeri dan luar negeri;
3. Memfasilitasi Temu Usaha baik PMA dan PMDN bekerjasama dengan badan promosi instansi kelembagaan dan pihak swasta ;
4. Melaksanakan promosi dan kerjasama penanaman modal melalui kegiatan pameran, seminar, lokakarya, Rakor, baik instansi vertikal dan pihak swasta (pelaku usaha);
5. Melaksanakan forum temu usaha dalam rangka kemitraaan ;
6. Menyusun Program kerja dibidang promosi dan disinkronisasikan dengan potensi local serta kerjasama dengan BKPM dalam hal promosi secara internasional dan nasional ;
7. Menyusun Perjanjian Kerjasama antara pihak pemerintah daerah dengan pelaku usaha yang dapat saling menguntungkan kepada kedua belah pihak ;
8. Memberikan kemudahan dan memfasilitasi kepada pelaku dunia usaha agar tertarik dan merasa nyaman berinvestasi di daerah ;
9. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap investasi serta memberikan pembinaan dan kemudahan dalam berinvestasi di daerah ;
10. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas

dan kewenangan Dinas.

11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Seksi Pengendalian dan Pengawasan.

Seksi Pengendalian dan Pengawasan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan kebijakan pengendalian dan pengawasan penanaman modal, Menetapkan regulasi dan pedoman pembinaan pengawasan, perencanaan dan penanaman modal serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pengendalian dan Pengawasan mempunyai fungsi :

1. Menyelenggarakan pemantauan bimbingan dan pengawasan terhadap PMA dan PMDN ;
2. Melaksanakan sosialisasi tentang regulasi dibidang pengawasan dan pengendalian pada kegiatan investasi PMA / PMDN yang telah merealisasikan kegiatan investasi di daerah ;
3. Memberikan petunjuk teknis khususnya kegiatan operasional perusahaan baik PMA maupun PMDN secara berkala;
4. Menyusun laporan realisasi kegiatan investasi secara berkala atau semester dan tahunan untuk diteruskan kepada Pemerintah Daerah dan BKPM;
5. Memfasilitasi pihak perusahaan atau pelaku usaha dalam hal memberikan arahan serta penyelesaian sengketa / permasalahan yang timbul baik secara external dan internal terkait dengan pihak pemerintah daerah secara proporsional dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan atau berlanjut pada penyelesaian secara hukum;
6. Menyusun laporan dan mengidentifikasi database sesuai

peruntukannya sebagai bahan evaluasi dan penyusunan perencanaan action penanaman modal.

7. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam hal teknis kegiatan investasi di daerah ;
8. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan ;
9. Melakukan Penginputan LKPM secara Online ;
10. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Seksi Pelayanan PMA dan PMDN.

Seksi Pelayanan PMA dan PMDN mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan kebijakan Khusus pada kegiatan Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri, dalam rangka pengembangan serta peningkatan minat para pelaku usaha untuk masuk berinvestasi didaerah dengan memberikan kemudahan serta memfasilitasi kepada para investor untuk berinvestasi didaerah. Dalam upaya tersebut melakukan inventarisasi potensi – potensi yang ada didaerah sebagai program unggulan dalam menyediakan potensi tersebut sebagai bahan investasi yang ditawarkan kepada para pengusaha / investor. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pelayanan PMA dan PMDN mempunyai fungsi :

1. Menyusun keakuratan data tentang potensi daerah yang dijadikan unggulan dan pasarkan sebagai bahan promosi yang ditawarkan kepada pihak pelaku usaha dalam hal ini investor PMA dan PMDN ;

2. Melaksanakan Regulasi di bidang PMA dan PMDN tentang ketentuan ijin Prinsip dan Proses Perizinan melalui SPIPISE ;
3. Memberikan petunjuk teknis khususnya kegiatan operasional perusahaan baik PMA maupun PMDN secara berkala;
4. Mengidentifikasi lokasi / tata ruang berdasarkan perda tentang peruntukkan investasi ;
5. Menyusun Study kelayakan (Fisibility Study) dalam perencanaan kegiatan PMA dan PMDN ;
6. Mengkoordinasikan kegiatan Investasi PMA / PMDN dengan instansi vertical dan horizontal yang ada di daerah ataupun dipusat dalam hal sinkronisasi di bidang regulasi / Teknis dan kearifan local di bidang potensi investasi ;
7. Menyusun Kegiatan Realisasi Investasi PMA / PMDN secara berkala dan tahunan sebagai bahan laporan dan perkembangan investasi di daerah ;
8. Melaksanakan system pelayanan perizinan berbasis online dan memverifikasi database guna penginputan melalui system SPIPISE secara Komputerisasi atau manual terhadap perkembangan dan permasalahan yang dihadapi oleh PMA dan PMDN ;
9. Melaksanakan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja dan Hubungan Industrial

Bidang Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja dan Hubungan Industrial mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan di bidang Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja dan

Hubungan Industrial, serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya dan fungsinya.

Bidang Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja dan Hubungan Industrial Mempunyai Fungsi :

1. Mengkoordinasikan Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.
 2. Mengkoordinasikan Pembinaan Organisasi Pekerja dan Pengusaha, Lembaga Kerja sama Bipartit dan Tripartit, Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja serta Peselisihan Hubungan Kerja.
 3. Melaksanakan dan Mengkoordinasikan Bimbingan Tehnis Dengan Instansi Terkait, Sosialisasi Penegakkan Hukum di Bidang Ketenagakerjaan.
 4. Melaksanakan dan Mengkoordinasikan Pelayanan Pengujian Kelayakan terhadap Pemberian izin dibidang Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja dan Hubungan Industrial ;
 5. Pembinaan Persyaratan Kerja (Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Kesepakatan Kerja Bersama) Pembentukan dan Pembinaan Karyawan dan Keluarga Berencana Perusahaan ;
 6. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengembangan ekonomi, penyediaan pengelolaan sarana dan prasarana, mitigasi lingkungan dan fasilitasi sertifikasi lahan dipermukiman transmigrasi ;
 7. Melaksanakan Fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas;
 8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya ;
- a. Seksi Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja dan Ketrasmigrasian.**

Seksi Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja dan

Ketransmigrasian mempunyai tugas pokok Melaksanakan Penatausahaan Administrasi dan Membuat rencana program kerja Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja dan Ketransmigrasian serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja dan Ketransmigrasian mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan dan menyusun Rencana Program Kerja Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja dan Ketransmigrasian ;
2. Melaksanakan dan menyiapkan data penyusunan bahan pembinaan penempatan tenaga kerja ;
3. Melaksanakan dan menyiapkan dokumen / regulasi tentang informasi pasar kerja, bursa pasar kerja, analisis serta penyuluhan / sosialisasi ;
4. Melaksanakan dan menyusun serta membuat system pedoman pembinaan informasi kebutuhan tenaga kerja melalui TI berbasis online ;
5. Melaksanakan dan mengkoordinasikan serta melakukan kerjasama dengan pihak swasta bersama pemerintah daerah dalam hal ketersediaan lowongan kerja dan penempatan tenaga kerja pada pihak perusahaan dan pemerintah ;
6. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan pemberdayaan pencari kerja, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja ;
7. Melaksanakan Pelayanan Pengujian kelayakan terhadap pemberian izin dibidang penempatan perluasan kesempatan kerja sector formal dan informal ;
8. Menyiapkan bahan pembinaan dan penempatan tenaga kerja pemuda dan wanita serta tenagakerja penyandang

cacat dan lanjut usia ;

9. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Seksi Hubungan Industrial.

Seksi Hubungan Industrial mempunyai tugas pokok Melaksanakan Penatausahaan Administrasi dan Membuat rencana program kerja Hubungan Industrial serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Hubungan Industrial mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan rencana program kerja hubungan industrial;
2. Melaksanakan pencegahan perselisihan hubungan Industrial, penyelesaian perselisihan dan pemutusan hubungan kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
3. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan organisasi pekerja dan organisasi pengusaha, lembaga kerja sama bipartit (Penyelesaian antara kedua belah pihak, pekerja dan pengusaha) dan Tripartit (Penyelesaian antara ketiga belah pihak, pekerja, pengusaha dan pemerintah) ;
4. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan pengaturan syarat kerja (perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian kerjasama) pembentukkan dan pembinaan fasilitas kesejahteraan (koperasi karyawan, Keluarga berencana perusahaan dan Olah raga) ;
5. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan dan pengupahan ;
6. Melaksanakan pelayanan pengesahan, pendaftaran,

- pencatatan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama dan Outsourcing ;
7. Melaksanakan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.
 8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Peningkatan Kompetensi, Produktifitas dan Perlindungan Jamsostek

Bidang Peningkatan Kompotensi, Produktifitas dan Perlindungan Jamsostek mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Peningkatan Kompotensi, Produktifitas dan Perlindungan Jamsostek, serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya dan fungsinya.

Bidang Peningkatan Kompotensi, Produktifitas dan Perlindungan Jamsostek Mempunyai Fungsi :

1. Melaksanakan dan Mengkoordinasikan pelatihan, produktifitas tenaga kerja dan perlindungan jaminan social tenaga kerja ;
2. Melaksanakan dan Mengkoordinasi jaminan social tenaga kerja;
3. Melaksanakan dan Mengkoordinasikan pelatihan ketenagakerjaan;
4. Melaksanakan dan Mengkoordinasikan Penyediaan SDM, Pengelolaan sarana dan prasarana pelatihan tenaga kerja ;
5. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan database ketenagakerjaan daerah ;
6. Melaksanakan dan mengkoordinasikan peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktifitas ;
7. Melaksanakan Fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas;
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai dengan bidang tugasnya ;

a. Seksi Peningkatan Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja

Seksi Peningkatan Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok Melaksanakan Penatausahaan Adminsitration dan Membuat rencana program kerja Peningkatan Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Peningkatan Kompetensi dan Produktifitas Tenaga mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan dan Menyusun database ketenagakerjaan daerah
2. Melaksanakan, menyiapkan bahan penyusunan system, pedoman pendidikan dan pelatihan tenaga kerja ;
3. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyuluhan, pembinaan, pelatihan dan produktifitas tenaga kerja ;
4. Melaksanakan, Menyiapkan bahan pembinaan standarisasi dan sertifikasi tenaga kerja ;
5. Melaksanakan, menyiapkan bahan pembinaan terhadap balai latihan kerja / kursus latihan kerja dan balai pengembangan produktifitas daerah, lembaga pemerintah, lembaga uji coba keterampilan, lembaga pelatihan swasta dan perusahaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat ;
6. Memasyarakatkan dan mengembangkan program pemagangan dilembaga pelatihan diperusahaan serta mengembangkan keterkaitan, kesepadanan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelatihan ;
7. Melaksanakan peningkatan kompetensi instruktur dan

tenaga kepelatihan ;

8. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Seksi Perlindungan Jamsostek.

Seksi Perlindungan Jamsostek mempunyai tugas pokok Melaksanakan Penatausahaan Adminsitration dan Membuat rencana program kerja Perlindungan Jamsostek serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Perlindungan Jamsostek mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan rencana program kerja perlindungan jaminan social tenaga kerja;
2. Melaksanakan dan menyiapkan bahan / regulasi untuk pembinaan jaminan social tenaga kerja ;
3. Melaksanakan dan menyiapkan data kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja;
4. Melaksanakan dan menyiapkan pelayanan rekomendasi jaminan hari tua pekerja / buruh diperusahaan ;
5. Melaksanakan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.4 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 08 Tahun 2016, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris yang membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan Program, evaluasi dan pelaporan
3. Bidang Penanaman Modal, yang membawahi ;
 - a. Seksi Promosi dan Hubungan Kerjasama;
 - b. Seksi Pengendalian dan Pengawasan ;
 - c. Seksi Pelayanan PMA dan PMDN
 4. Bidang pelayanan terpadu satu Pintu, yang membawahi;
 - a. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan ;
 - b. Seksi Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal ;
 - c. Seksi Verifikasi dan Administasi Pelayanan ;
 5. Bidang Penempatan, Perluasan kesempatan kerja dan Hubungan Industrial yang membawahi;
 - a. Seksi Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b. Seksi Hubungan Industrual ;
 6. Bidang Peningkatan Kompetensi, Produktifitas dan Perlindungan jamsostek yang membawahi ;
 - a. Seksi Perlindungan dan Peningkatan Jamsostek ;
 - b. Seksi Peningkatan Kompetensi dan Produktifitas Tenaga kerja
 7. UPTD; dan
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara lengkap susunan organisasi Dinas penanaman modal Pelayanan terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja kabupaten Bone bolango dapat digambarkan dalam diagram terlampir.

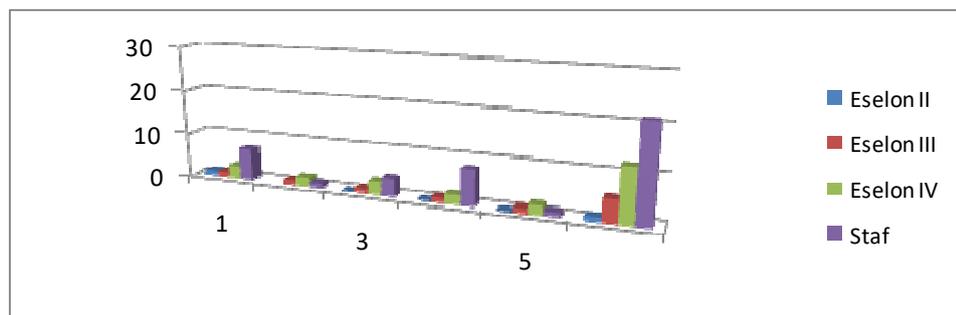
2.2 SUMBER DAYA MANUSIA

Selanjutnya terkait dengan keadaan sumber daya manusia aparatur yang terdapat pada Dinas Penanaman Modal, pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Sumber Daya Manusia Sesuai Eselon

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kepala Dinas	1	-	-	-	1
2.	Sekretaris Dinas	-	1	3	7	11
3.	Bidang Penanaman Modal	-	1	2	1	4
4.	Bidang PTSP	-	1	3	4	8
5.	Bidang Penempatan, perluasan kesempatan kerja dan HI	-	1	2	8	16
6	Bidang peningkatan kompetensi, produktifitas dan perlindungan jamsostek	-	1	2	1	4
Jumlah		1	5	12	21	39

Dalam grafik dapat dilihat sebagaimana dibawah ini:



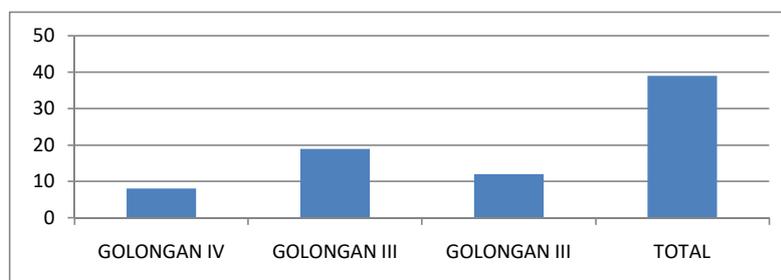
Gambar 2. 1 Grafik Sumber Daya Manusia

Keadaan Pegawai pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Golongan Pangkat sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Sesuai Golongan

Pegawai	2017 (Orang)
Golongan IV	8
Golongan III	19
Golongan II	12
Jumlah	39

Dalam grafik dapat dilihat sebagaimana dibawah ini;

**Gambar 2. 2 Jumlah Pegawai Sesuai Golongan**

Selanjutnya Kondisi Pegawai dan Tenaga Kontrak pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja menurut Tingkat Pendidikan yang ditamatkan :

Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai Sesuai Tingkat Pendidikan

Pegawai	2017 (Orang)
Sarjana S2	5
Sarjana S1	19
SMA	15
Jumlah	39

Dalam grafik dapat dilihat sebagaimana dibawah ini;



Gambar 2. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD

2.3.1 Sasaran dan Target Renstra Periode Sebelumnya

Berikut ini pencapaian kinerja pelayanan SKPD sebagaimana berikut ini :

Tabel 2. 4 **Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD BPMPTSP	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Jumlah perizinan dan non perizinan yang telah dikeluarkan	100%	100%	-	N/A	N/A	800	1.000	1.200	N/A	N/A	890	1.075	1.223
2	Jumlah pemantauan , pembinaan dan pengawasan penanaman modal	100%	100%	-	-	-	-	50 Perusahaan	50 Perusahaan	-	-	-	50 Perusahaan	50 Perusahaan
3	Jumlah kajian penanaman modal	100%	100%					50 Dokumen kajian					50 Dokumen Kajian	
4	Jumlah pelayanan investasi	100%	100%				50 Perusahaan	50 Perusahaan				50 Perusahaan	50 Perusahaan	

5	Jumlah potensi investasi daerah	100%	100%		-			3 Potensi Unggulan					3 Potensi Unggulan	
6	Jumlah SDM penanaman modal	100%	100%					3 Org						

Tabel 2. 5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Jumlah perizinan dan non perizinan yang telah di keluarkan	-	238.781	200.620	40.985	104.880	-	238.781	200.550	40.985	104.196	-	100 %	99,96 %	100 %	99,34 %
Jumlah pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal	-	-	-	13.999.5	90.554	-	-	-	13.999.5	90.494	-	-	-	100 %	99,93 %
Jumlah kajian penanaman modal	-	-	-	32.577	-	-	-	-	30.832	-	-	-	-	99,70 %	-
Jumlah pelayanan investasi	-	-	-	22.500	22.000	-	-	-	22.420	22.000				99,64 %	100 %
Jumlah potensi investasi daerah	-	-	-	-	25.425	-	-	-	-	25.425	-	-	-	-	100 %
Jumlah SDM penanaman modal	-	-	-	-	18.508	-	-	-	-	18.414	-	-	-	-	99, 49 %

2.3.2 Target SPM Untuk Urusan Wajib

Standar Pelayanan Minimal Penanaman Modal dan PTSP meliputi pelayanan dasar beserta indikator kinerja dan target pencapaian sampai dengan 2015 yang terdiri dari :

1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
2. Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan
3. Kajian Penanaman Modal
4. Potensi Unggulan Daerah
5. SDM Penanaman Modal

Berikut ini adalah capaian keberhasilan sampai tahun 2016 :

JUMLAH PEMBERIAN PELAYANAN DAN PERIZINAN DI KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2014 - 2016

NO	JENIS PELAYANAN PERIZINAN	JUMLAH MASYARAKAT YANG DILAYANI (ORANG)			TOTAL
		2014	2015	2016	
1	Surat Izin Gangguan	426	502	288	1.216
2	Fiskal	-	-	-	
3	Izin Membangun Bangunan	122	149	257	528
4	Surat Izin Usaha Perdagangan	243	250	278	771
5	Tanda Daftar Perusahaan	237	249	289	775
6	Izin Usaha Jasa Konstruksi	47	69	86	202
7	Izin Lokasi	0	0	0	0
8	Perhubungan Darat	0	0	0	0
9	Perhubungan Darat	0	0	0	0
10	Tanda Daftar Industri	0	4	9	13

Pada kenyataannya penyelenggaraan pelayanan perizinan di DPMPSTSP&TK belum dapat terlaksana secara optimal. Hal ini disebabkan antara lain oleh permasalahan kualitas SDM yang kurang dibidang PTSP,

sistem aplikasi yang digunakan belum optimal, Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang persyaratan proses perizinan, Sarana dan prasana penunjang kegiatan masih kurang, gedung kantor yang kurang memadai. Selain itu regulasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi hal yang sangat penting dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat sehingga tercipta pelayanan yang optimal yang hasilnya akan terlihat dari meningkatnya indeks kepuasan masyarakat.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

SKPD

a. Tantangan

- 1) Adanya persaingan Pelayanan Investasi dengan daerah lain
- 2) Faktor keamanan menjadi kendala Investasi.
- 3) Infrastruktur Wilayah belum merata.
- 4) Sumber Daya Informasi masih sangat terbatas terutama mengenai Sistem informasi yang berbasis teknologi.
- 5) Persaingan Global dibidang Investasi
- 6) Luasnya wilayah jangkauan pelayanan perizinan
- 7) Besarnya Angka Pengangguran
- 8) Sistem Pelayanan antar kerja belum online
- 9) Rendahnya pemahaman pengusaha dan pekerja terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan
- 10) Kurangnya Tenaga Fungsional dalam pembinaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial
- 11) Rendahnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja di pedesaan
- 12) Belum Tersedianya Prasarana Pelatihan tenaga kerja
- 13) Rendahnya kesadaran pengusaha pekerja terhadap keikutsertaan jamsostek

b. Peluang

- 1) Perkembangan Teknologi yang semakin pesat
- 2) Potensi Usaha yang cukup beragam

- 3) Minat Investor cukup optimis untuk menanamkan modalnya di Bone Bolango.
- 4) Minat Berusaha Masyarakat semakin meningkat
- 5) Potensi usaha yang cukup beragam.
- 6) Minat Investor untuk berinvestasi sangat tinggi
- 7) Terbukanya Kesempatan Kerja dari sector formal dan informal
- 8) Besarnya Minat Pencari kerja untuk mendaftarkan diri mengisi lowongan kerja
- 9) Meningkatnya jumlah pekerja yang bekerja disektor formal (dalam Hubungan Kerja)
- 10) Tersedianya sarana pelatihan berupa otomotif dan computer
- 11) Besarnya minat pekerja untuk memperoleh hak jaminan social tenaga kerja

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD

Dalam mencermati potensi, aspek tinjauan yang perlu dilakukan adalah berbagai faktor kekuatan yang nampak dan yang tidak nampak tapi memungkinkan untuk didayagunakan menjadi faktor yang nyata (visible) melalui berbagai upaya. Pencermatan terhadap lingkungan internal organisasi menjadi fokus tinjauan, baik aspek legal keberadaan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone Bolango, kelembagaan / organisasi, tatalaksana, maupun sumber daya manusia (SDM) pegawainya.

Upaya untuk peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone Bolango yang dilaksanakan dalam rangka mengemban misi untuk mewujudkan visi dimasa depan. Pada bagian ini dikemukakan permasalahan - permasalahan pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Tabel 3. 1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD

Aspek Kajian	Capaian/Kon disi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pelayanan Perizinan Pada DPMPTSP&TK	Produk Perizinan Masih Mudah untuk di Duplikasi dan atau dimanipulasi/ ditiru	1) Kepmenpan No. 63/Kep./M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2) PerMenPan dan RB No. 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik.	Belum didukung oleh sarana operasional berbasis teknologi	Tuntutan Kemajuan teknologi yang semakin modern	Belum optimalnya Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik yang dapat menunjang pengawasan dan pengendalian
			Kemampuan pegawai yang kurang memadai.	Dukungan politik dalam pengembangan SDM aparatur SKPD/ REgulasi yang Dinamis	Kurangnya pengembangan SDM aparatur SKPD

		3) PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum.	Peningkatkan sarana dan prasarana pelayanan	Dukungan politik terhadap sarana dan prasarana pelayanan public	Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan publik
Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Luar Negeri	Investasi PMDN dan PMA belum maksimal	1) Perpres Nomor 16 Tahun 2012 2) Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2015	Sosialisasi /promosi potensi yang belum maksimal	Sarana penyebarluasan informasi potensi daerah	Belum optimalnya promosi potensi daerah dalam pengembangan investasi di daerah
		2) Peraturan Kepala BKPM Nomor 15 Tahun 2015 3) Peraturan Kepala BKPM Nomor 16 Tahun 2015	Tenaga Teknis Penelitian/SDM belum memadai	Kurangnya tenaga teknis peneliti dalam Pengembangan investasi daerah	Belum optimalnya pengembangan penelitian potensi daerah
Pengendalian dan pengawas bagi pelaku usaha	Koordinasi dalam pengawasan dan pengendalian	1) Perpres Nomor 16 Tahun 2012 2) Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2015 3) Peraturan Kepala BKPM Nomor 15 Tahun 2015	Produk hukum daerah yang belum ada sarana pendukung untuk pengaduan belum	Dukungan politik dalam penyusunan peraturan dan atau produk hukum daerah tentang perizinan Partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pelaku	Belum optimalnya penyusunan produk hukum daerah dalam perizinan dan non perizinan Belum optimlanya

			ada	usaha belum maksimal	dukungan sarana pengaduan bagi masyarakat
Pelayan Antar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja AKAL, AKAD, AKAN	Bursa Kerja belum online, rendahnya penempatan tenaga kerja AKAL, AKAD, AKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 2. Kepres No. 4 Tahun 1980 Tentang Wajib Laporan Lowongan Pekerja 3. Permen Nomor 07/MEN/IV/2008 	Minimnya Anggaran yang tersedia	Belum Adanya SDM Khususnya Tenaga Teknis Fungsional Pengantar Kerja	Kurangnya Kesadaran Pemberi kerja untuk mendaftarkan lowongan kerja dan melaporkan hasil penempatan tenaga kerja
Pelayanan Penyelesaian Perselisihan HI, Pengesahan PP/PKB, Pendaftaran/pencatatan, outsourcing	Kurangnya Kesadaran / Pemahaman pekerja untuk melaporkan perselisihan HI	<ol style="list-style-type: none"> 1. UUD No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 2. UUD No.2 Tahun 2004 tentang PPHI 3. Permen Naker N0. 28 tahun 2014 tentang Pengesahan PP dan PKB 	Belum Tersedianya Sarana dan Prasarana Penyelesaian Perselisihan	Dukungan Politik Pemerintah daerah	Kurangnya kesadaran pengusaha untuk melaksanakan hak-hak normative pekerja / buruh

		4. Permen Nakertrans No. 19 tahun 2012 tentang penyerahan pekerjaan penunjang pada perusahaan lain			
Pelatihan Peningkatan Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Banyaknya Lulusan SMA/SMK yang belum terakomodir di dunia usaha - Rendahnya Produktifitas Tenaga Kerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UUD No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 2. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2006 tentang system pelatihan kerja nasional 3. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1991 Tentang Pelatihan Kerja 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum Tersedianya BLK untuk menyelenggarakan pelatihan - Database Ketenagakerjaan 	<p>Dukungan kerjasama dengan Pihak Swasta</p> <ul style="list-style-type: none"> -Kurangnya Industrial yang tersedia 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan kerjasama dengan Pihak Swasta -Kurangnya Industrial yang tersedia
Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> -Rendahnya kesadaran pengusaha 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN (system jaminan social nasional) 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya Sosialisas jaminan Sosial Tenaga Kerja 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kesadaran dan ketidaktahuan bagi para tenaga kerja yang 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya modal yang dimiliki oleh perusahaan dan

	<p>mengikutserta kan pekerja dalam program jaminan social tenaga kerja</p>	<p>2. UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS 3. Peraturan Pemerintah No. 86 tahun 2013 tentang cara pengenaan sanksi administrative kepada pemberi kerja selain penyelenggara Negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan dalam penyelenggaraan jaminan social 4. Pepres No. 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial</p>		<p>sudah bekerja diperusahaan dan pihak perusahaan juga tidak memberikan sosialisasi terhadap regulasi tentang ketenagakerjaan -Adanya kesengajaan pihak perusahaan untuk tidak melaporkan kepada pihak BPJS dan Instansi terkait terhadap penggunaan tenaga kerja disebabkan perusahaan menghindari biaya / iuran BPJS</p>	<p>perusahaan belum mengelola perusahaan secara professional -Pihak perusahaan masih tergantung pada investasi pemerintah yang bersumber dari APBN, APBD sehingga terjadi pekerjaan berifat temporer - Kurangnya / rendahnya pendidikan, Pengetahuan Bagi para tenaga kerja yang digunakan oleh perusahaan sehingga menyebabkan apabila terjadi resiko maka mereka tidak mendapatkan hak</p>
--	--	---	--	---	--

Tabel 3. 2 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Perkembangan Teknologi Informasi Dunia	Pelayanan secara elektronik	Pelayanan secara elektronik dan berbasis web	Peluang kerja sama dengan pihak perguruan tinggi daerah dalam pengembangan industry kreatif
2	Lahan investasi hampir semua bidang di Indonesia cukup besar	Kemudahan izin investasi 3 Jam di BKPM	Belum adanya kajian potensi daerah Fisibility Study (FS)	Peluang kerjasama dengan pihak perguruan tinggi dalam penelitian potensi daerah
3	Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)	Nawa Cita Presiden untuk peningkatan pelayanan publik	Sarana dan Prasarana Publik (infrastruktur daerah)	Kerja sama dengan pihak penegak hukum dalam penegakan peraturan perundangan yang berlaku
4		Peningkatan Koordinasi dan	Potensi Daerah Belum	

	Jumlah Penduduk Indonesia sangat banyak	Harmonisasi antara Pusat dan daerah	terpromosi secara baik	Banyaknya sarana public dapat untuk melkukan promosi
5	Indonesia merupakan negara berkembang	Target investasi Nasional naik 2 kali lipat dari target tahun sebelumnya	Persaingan Investasi antar daerah semakin banyak	Penemuan baru tentang energy terbarukan
6	Indonesia Termasuk Negara yang banyak meratifikasi konfensi-konfensi ILO	Masih terdapatnya prokontra tentang pemberlakuan outsourcing oleh pihak pekerja/buruh dan oleh pihak pemerintah tuntutan tersebut bagi pekerja dihapuskan outsourcing. Namun dipihak lain oleh pemerintah sudah terakomodir dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku	-Kurang nya Pertumbuhan di Sektor Rill sehingga terjadinya pengangguran -Pertumbuhan tenaga kerja disektor formal dan informal masih tergantung kepada investasi pemerintah melalui APBD dan APBN	Kurang Tersedianya Tenaga Terampil yang siap pakai -Tidak tersedianya sarana dan prasarana pelatihan bagi tenaga kerja yang siap pakai -terbatasnya anggaran pemerintah untuk memfasilitasi saran dan prasarana sebagai tempat pelatihan -belum tersedianya tenaga instruktur / pelatih dari berbagai bidang keahlian yang dimiliki oleh instruktur

3.2 TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KDH DAN WAKIL KDH TERPILIH

Visi dan misi pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2016 – 2021 sebagaimana dibawah ini :

Visi :

“ Terwujudnya Bone Bolango Cemerlang 2021”

Memaknai visi dalam bentuk implementasi misi, tujuan dan sasaran, maka pengertian visi tersebut kedalam tiga suku kata dapat diterjemahkan sebagai berikut :

CEMERLANG dalam makna luas adalah suatu kondisi pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bone Bolango yang *“Unggul dan Berdaya saing”* serta masyarakatnya berada pada tingkat peradaban tinggi.

CEMERLANG dalam makna akronim diterjemahkan kedalam 3 (tiga) pilar utama, yakni :

CE (Cerdas), MER (Modern), LANG (Gemilang)

Cerdas : Adalah kondisi masyarakat yang menjalani kehidupan sebagai warga negara berlandaskan kemampuan kesehatan jasmani dan rohani serta memiliki kecerdasan akal budi intelektual, akal budi emosional, dan akal budi spiritual.

Modern : Adalah kondisi entitas masyarakat Bone Bolango yang memiliki kemajuan peradaban manusia dengan bercirikan kemampuan adaptasi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi.

Gemilang : Memiliki makna capaian kinerja pelayanan pemerintahan yang diindikasikan dengan suatu kondisi masyarakat sejahtera dari sisi ekonomi dalam konteks kesejahteraan sosial, dan sejahtera dari sisi kebijakan sosial yang memberikan penekanan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan target besar yakni pengurangan rakyat miskin secara konsisten dan berkelanjutan.

Misi :

1. Mewujudkan Masyarakat Sehat dan Sejahtera;

2. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dan pembangunan desa sebagai basis pertumbuhan wilayah;
3. Mewujudkan perekonomian Daerah yang berdaya saing, merata dan berkeadilan;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang moderen dan berbudaya;

Tujuan dan Sasaran dari Visi dan Misi:

Tujuan ;

1. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan Kesehatan berkualitas ;
2. Meningkatkan peranan kepemudaan dan pengharustamaan gender ;
3. Meningkatkan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat ;
4. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur Dasar wilayah miskin ;
5. Meningkatkan pembangunan Desa ;
6. Meningkatkan daya saing sektor-sektor unggulan (leading Sectors) ;
7. Memperkuat ketahanan pangan Daerah ;
8. Meningkatkan peluang investasi ;
9. Terwujudnya Kualitas Layanan dan Partisipasi Publik;
10. Meningkatkan peluang investasi ;
11. Terciptanya pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan ;

3.3 TELAAH RT RW DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Wilayah perencanaan Rencana Tata Ruang Wilayah meliputi seluruh wilayah administrasi Kabupaten Bone Bolango dengan luas wilayah kurang lebih 1.984,58 km². terdiri atas kecamatan meliputi:

- a. Kecamatan Tapa;
- b. Kecamatan Bulango Utara;
- c. Kecamatan Bulango Selatan;

- d. Kecamatan Bulango Timur;
- e. Kecamatan Bulango Ulu;
- f. Kecamatan Kabila;
- g. Kecamatan Botupingge;
- h. Kecamatan Tilongkabila;
- i. Kecamatan Suwawa;
- j. Kecamatan Suwawa Selatan;
- k. Kecamatan Suwawa Timur;
- l. Kecamatan Suwawa Tengah;
- m. Kecamatan Kabila Bone;
- n. Kecamatan Bone Pantai;
- o. Kecamatan Bulawa;
- p. Kecamatan Bone Raya;
- q. Kecamatan Bone; dan
- r. Kecamatan Pinogu.

Dan Batas wilayah perencanaan Rencana Tata Ruang Wilayah, meliputi:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo Utara & Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini;
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo.

Tabel 3. 3 Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Rencana Pola Ruang Lokasi Izin Pergudangan/ Tanda Daftar Pergudangan di kawasan Kecamatan Botupingge	<ol style="list-style-type: none"> Kurangnya sarana dan prasarana Infrastruktur Jalan, Jembatan Wilayah Kecamatan Kawasan Pergudangan merupakan daerah rawan bencana 	<ol style="list-style-type: none"> Sarana dan Prasarana Infrastruktur Jalan, Jembatan, Sarana dan Prasarana Mitgasi Bencana Struktural 	Potensi pergudangan cukup baik berdekatan dengan sarana pelabuhan dan ibu kota provinsi gorontalo
2.	Rencana Pola Ruang Kawasan Pemukiman Perkotaan untuk Izin Lokasi (pembangunan perumahan)	Pengusaha develover perumahan lebih tertarik membangun perumahan dengan tipe standar dikawasan pemukiman	Penetapan Kawasan pemukiman perkotaan	Makin bertambahnya peminat perumahan dan lokasi dikawasan pemukiman perkotaan

		peekotaan		
3.	Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Peternakan untuk izin gangguan peternakan	Penyebaran usaha peternakan yang berkembang/ menyebar yang di hampir seluruh wilayah Kabupaten Bone Bolango	Penetapan kawasan budidaya ayam kampung/ peternakan	Meningkatnya taraf hidup masyarakat pelaku usaha dan masyarakat sekitarnya

Tabel 3. 4 Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Perizinan Lokasi Investasi PMN/PMDN	Belum adanya penetapan kawasan industri	Penetapan Kawasan Industri	Peningkatan ekonomi masyarakat yang akibatkan pertumbuhan industri
2.	Penetapan Lokasi Perumahan	Belum adanya kajian lingkungan	Belum adanya	Wilayah Daerah Kabupaten Bone Bolango

	Perkotaan dan Perkantoran	AMDAL, UKL/UPL Kawasan Perumahan Perkotaaan dan Perkantoran	kajian AMDAL dan UKL/UPL kawasan	merupakan Wilayah Berpotensi untuk pengembangan perumahan perkotaan
3.	Penetapan Lokasi Peternakan Hewan	Belum adanya kajian lingkungan AMDAL, UKL/UPL kawasan peternakan hewan	Belum adanya kajian AMDAL dan UKL/UPL kawasan	Potensi peternakan hewan dan semakin banyaknya perizinan usaha peternakan hewan
4.	Penetapan Kawasan Pergudangan sebagai penunjang kawasan industri Provinsi Gorontalo	Kawasan Pergudangan merupakan wilayah rawan bencana	Belum adanya teknologi kekinian dalam pengendalian dan atau mitigasi struktural bencana	Berpotensi sebagai wilayah pergudangan berdekatan dengan kawasan industri kota gorontalo

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan SKPD antara lain dapat dilakukan dengan cara;

1. Dibahas melalui forum *Focussed Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan para pakar yang memiliki pengalaman merumuskan isu-isu strategis.
2. Menggunakan metode pembobotan dengan cara Menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan.

Maka dapat disajikan tabel skor criteria penentuan isu-isu strategis

Tabel 3. 5 Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kriteria*)	Bobot**)
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi/kabupaten/kota	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
	Total	100

Tabel 3. 6 Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke-							Total Skor
		1	2	3	4	5	6	Dst...	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Perkembangan Teknologi Informasi pelayanan perizinan	20	10	20	10	15	25	-	100
2	Nawa Cita Presiden untuk peningkatan pelayanan publik	20	10	20	10	15	25	-	100
3	Peningkatan Koordinasi dan Harmonisasi antara Pusat dan daerah	20	10	20	10	15	25	-	100
4	Target investasi Nasional naik 2 kali lipat dari target tahun sebelumnya	20	10	20	10	15	25	-	100
5	Pertumbuhan Industri Kreatif semakin tak terhindarkan	20	10	20	10	15	25	-	100
6	Belum adanya kajian potensi daerah Dan produk unggulan daerah	20	10	20	10	15	25	-	100
7	Sarana dan Prasarana Publik (infrastruktur daerah)	20	10	20	10	15	25	-	100
8	Potensi Daerah	20	10	20	10	15	25	-	100

	Belum terpromosi secara maiksmal								
9	Persaingan usaha Investasi antar daerah	20	10	20	10	15	25	-	100

Tabel 3. 7 Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

No.	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perkembangan Teknologi Informasi pelayanan perizinan	100	11,11
2	Nawa Cita Presiden untuk peningkatan pelayanan publik	100	11,11
3	Peningkatan Koordinasi dan Harmonisasi antara Pusat dan daerah	100	11,11
4	Target investasi Nasional naik 2 kali lipat dari target tahun sebelumnya	100	11,11
5	Pertumbuhan Industri Kreatif semakain tak terhindarkan	100	11,11
6	Belum adanya kajian potensi daerah Dan produk unggulan daerah	100	11,11
7	Sarana dan Prasarana Publik (infrastruktur daerah)	100	11,11
8	Potensi Daerah Belum terpromosi secara maiksmal	100	11,11
9	Persaingan usaha Investasi antar daerah	100	11,11

BAB IV

VISI MISI, TUJUAN DAN SASARAN

4.1. VISI DAN MISI

4.1.1 Visi

Visi memberikan gambaran atau pandangan tentang keadaan masa depan dengan memuat cita dan citra yang bersifat antisipatif, inovatif dan produktif yang ingin diwujudkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango.

Pernyataan Visi Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PELAYANAN PERIZINAN YANG PRIMA DALAM Mendukung IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF”

Penjelasan Visi :

Dalam mewujudkan Visi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut ; Bahwa yang dimaksud dengan **Iklim Investasi Yang Kondusif** adalah suatu iklim yang memiliki jaminan keamanan, kestabilan politik, kepastian hukum berusaha, kebijakan/kemudahan oleh pemerintah daerah terhadap para pelaku dunia usaha/investor untuk berinvestasi.

Pelayanan Perizinan Prima artinya Kemudahan dalam memberikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang prima, melalui 5 budaya kerja yaitu pelayanan cepat, mudah, ramah, bernilai dan beradab yang diwujudkan kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas dan kerja tuntas dengan motto “Pelayanan Cemerlang”

4.1.2 Misi

Misi Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dibawah ini :

- a. Menciptakan Pelayanan Perizinan yang prima dan Penanaman Modal yang berkualitas untuk meningkatkan realisasi investasi serta daya saing investasi daerah;
- b. Menciptakan Tenaga Kerja yang berkompoten dan memiliki jaminan perlindungan.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP&TK) adalah :

1. Meningkatnya nilai investasi di Kabupaten Bone Bolango
2. Meningkatnya kemudahan pelayanan perizinan bagi pelaku usaha
3. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka
4. Meningkatnya tenaga kerja informal yang difasilitasi menjadi peserta JPTK.
5. Terwujudnya Aparatur DPMPTSP&TK yang professional dan berkinerja tinggi.

Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.1.

Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI AWAL RENSTRA	TARGET TH5	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					
							REALISASI RENSTRA			TARGET		KONDISI AKHIR RENSTRA
							2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	*Meningkatnya peluang Investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	*Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah	<50%	<50%	*Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	*Jumlah Nilai Investasi PMA: PMDN :	39.180.991.138 10.223.944.500	49.235.431.225 347.219.626.000	83.742.705.000 76.065.685.400	0 0	0 0	0 0
					*Meningkatnya Kualitas Pelayanan PTSP	*Nilai IKM (%)	87,5%	90%	92,5%	0	0	0
	Meningkatnya kualitas pelayanan perzinan bagi pelaku usaha	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai B	B	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Investasi PMA: PMDN :	0 0	0 0	0 0	600.000.000.000 200.000.000.000	600.000.000.000 225.000.000.000	600.000.000.000 225.500.000.000
					Meningkatnya kemudahan pelayanan perizinan bagi pelaku usaha	Rata2 Waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian izin berdasarkan NSPK	10.080 Menit	10.080 Menit	10.080 Menit	5.760 Menit	5.760 Menit	5.760 Menit

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI AWAL RENSTRA	TARGET TH5	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					
							REALISASI RENSTRA			TARGET		KONDISI AKHIR RENSTRA
							2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	*Mendorong terciptanya penempatan, perluasan dan pelatihan kerja	*Prosentase Penempatan, Perluasan dan Pelatihan Kerja	5%	8%	*Meningkatnya kompetensi pencari Kerja	*Prosentase Pencari kerja yang ditempatkan	7%	8%	7%	0	0	0
	Mendorong terciptanya tenaga kerja yang berkompentensi dan memiliki jaminan perlindungan	Prosentase penurunan tingkat pengangguran terbuka	8%	6%	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Prosentase tingkat pengangguran terbuka	0	0	0	7%	6%	6%
		Persentase peningkatan tenaga kerja informal yang difasilitasi JPTK	41%	100%	Meningkatnya tenaga kerja informal yang difasilitasi menjadi peserta JPTK	% tenaga kerja informal yang dapat jaminan perlindungan	0	0	100	100	100	100

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI AWAL RENSTRA	TARGET TH5	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					
							REALISASI RENSTRA			TARGET		KONDISI AKHIR RENSTRA
							2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Disiplin dan Profesionalisme Aparatur dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya	100%	100%	Terwujudnya Aparat DPMPSTPK yang Profesional dan Berkinerja Tinggi	Nilai Sakip	B	B	B	B	B	B
						Prosentase Temuan Material	0	0	0	0	0	0

Catatan ; (*) Tujuan, Sasaran dan Indikator lama

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dalam pemenuhan tujuan pembangunan daerah untuk meningkatkan Penanaman Modal Pelayan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango telah menetapkan tujuan yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan bagi pelaku usaha ;
2. Mendorong terciptanya tenaga kerja yang berkompetensi dan memiliki jaminan perlindungan.

5.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN OPD

Strategi

Strategi yang digunakan dalam rencana ini adalah sesuai dengan hasil rumusan pertimbangan faktor internal dan faktor eksternal sebagai mana telah kami kemukakan yaitu :

- 1) Meningkatkan Iklim Investasi yang kondusif yang mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah ;
- 2) Menyediakan database ketenagakerjaan, Sosialisasi Regulasi, Pelatihan sebagai dasar arah kebijakan program dan kegiatan

Kebijakan

Adapun kebijakan Badan Penanaman Modal Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone Bolango adalah :

- 1) Pengembangan Promosi Potensi Unggulan Daerah berbagai sektor unggulan melalui berbagai forum promosi investasi serta media informasi Publik ;

- 2) Pengembangan Kawasan Khusus yang diarahkan sebagai wilayah Prioritas Investasi ;
- 3) Pengembangan Kemudahan dan Iklim Investasi yang kondusif melalui penyediaan PTSP, Penyederhanaan Prosedur Perizinan serta pengembangan sistem insentif dan disinsentif ;
- 4) Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja sesuai dengan kebutuhan pasar;

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : TERWUJUDNYA BONE BOLANGO CEMERLANG			
MISI III : MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG BERDAYA SAING, MERATA DAN BERKEADILAN			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIAJAKAN
1	2	3	4
Meningkatkan peluang investasi	Meningkatkan pertumbuhan investasi daerah	Meningkatkan Iklim Investasi yang kondusif yang mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	Pengembangan Promosi Potensi Unggulan Daerah diberbagai sektor Unggulan Melalui berbagai Forum Promosi Investasi serta Media Infomasi Publik
Meningkatkan daya saing sektor-sektor unggulan	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja. Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Perlindungan Sosial. 	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan fasilitasi bagi peningkatan kompetensi dan kualitas produktivitas tenaga kerja untuk mencetak tenaga kerja yang berkompeten. Memberikan fasilitasi bagi calon wirausaha baru untuk mencetak wirausaha baru yang berdaya saing. Peningkatan penempatan kerja danperluasan kesempatan kerja. Mengupayakan hubungan industrial harmonis, dinamis dan berkeadilan, kelangsunganusaha serta peningkatan kesejahteraan pekerja.

MISI IV : MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN MODEREN YANG BERBUDAYA			
1	2	3	4
Meningkatkan kualitas pelayanan dan partisipasi publik	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja	Memberikan Kemudahan Pelayanan Perizinan Kepada Calon Investor, Pelaku Usaha	Pengembangan Kemudahan dan iklim investasi yang kondusif melalui penyediaan PTSP, Penyederhanaan Prosedur Perizinan, serta pengembangan sistem Insentif dan disinsentif
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Optimalkan upaya pemberantasan KKN dengan meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai upaya pemenuhan tuntutan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel yang didukung dengan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan memenuhi standar akuntansi yang berlaku Meningkatkan kualitas kualitas dan ketetapan penyampaian LKIP guna meraih predikat B

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program dan Kegiatan

1. Program Non Urusan

- a. Program Pelayanan administrasi perkantoran
- b. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- c. Program Peningkatan disiplin aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2. Program Urusan Bidang Penanaman Modal

- a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

3. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

4. Program Urusan Bidang Tenaga Kerja

- a. Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
- b. Peningkatan Kesempatan Kerja
- c. Program Perlindungan dan pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

5.2 Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

1. Program Pelayanan administrasi perkantoran

Indikator Kinerja : - Prosentase cakupan layanan administrasi perkantoran yang berkualitas

Kegiatan :

- Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Belanja Operasional
Administrasi Perkantoran

- Kegiatan rapat-rapat dan konsultasi kedalam dan ke luar daerah

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Rapat - Rapat koordinasi dan Konsultasi kedalam dan keluar daerah yg diikuti

2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Indikator Kinerja : - Prosentase pemanfaatan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan peruntukannya

Kegiatan :

- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara

- Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan

3. Program Peningkatan disiplin aparatur

Indikator Kinerja : - Prosentase peningkatan disiplin aparatur

Kegiatan :

- Pengadaan pakaian Dinas beserta kelengkapannya

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Aparatur yang
mendapatkan pakaian dinas

- Pengadaan pakaian khusus dan hari-hari tertentu

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Aparatur yang
mendapatkan pakaian khusus
hari-hari

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Indikator Kinerja : - Prosentase capaian ASN yang
ditingkatkan kompetensinya

Kegiatan :

- Pendidikan dan Pelatihan Formal

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Aparatur yang
ditingkatkan kapasitasnya

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan

Indikator Kinerja : - Prosentase ketersediaan dokumen hasil
evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan perencanaan pembangunan
daerah sebagai bahan rekomendasi
pelaksanaan tahun berikutnya

Kegiatan :

- Penyusunan laporan capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Dokumen Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD

- Penyusunan laporan keuangan semesteran

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang dibuat

6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Indikator Kinerja : - Prosentase peningkatan investor yang masuk didaerah (PMA /PMDN)

Kegiatan :

- Pengembangan Potensi Unggulan

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Peluang Investasi

- Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengendalian Pelaksanaan PMDN / PMA

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Dokumen Investasi PMA/PMDN

- Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Dokumen Kegiatan Pemantauan, dan Pengawasan PMA / PMDN

- Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah SDM pelayanan investasi yang ditingkatkan kualitasnya (orang)

- Penyelenggaraan Pameran Investasi

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Pameran yang diikuti

- Koordinasi perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah PMA / PMDN yang mendapat persetujuan izin prinsip

7. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Indikator Kinerja : - Prosentase Pertumbuhan Nilai Investasi / Realisasi Investasi Daerah (PMA, PMDN Fasilitas, Non Fasilitas dan PMDN Murni)

Kegiatan :

1. Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan PM yang dipelihara

2. Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Perizinan dan Non perizinan yang ditindaklanjuti

(Realisasi PMA, PMDN dan
PMDN Murni)

3. Penyusunan Kebijakan Bagi Fasilitas Infrastruktur

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Fasilitas Pelayanan
yang dibuat

4. Monitoring dan Evaluasi

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Indeks Kepuasan
Masyarakat

8. Program Optimalisasi teknologi Informasi

Indikator Kinerja : - Prosentase Kepuasan ASN yang
menggunakan Sistem Aplikasi Pelayanan
Perizinan

Kegiatan :

1. Penyusunan Sistem Informasi Pelayanan Publik

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Sistem Pelayanan
Perizinan yang digunakan

9. Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

Indikator Kinerja :- Prosentase Pencari Kerja yang
ditingkatkan kualitasnya

Kegiatan :

1. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Tenaga Kerja yang
terampil dan mandiri

2. Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Dokumen
Ketenagakerjaan Daerah
(Database)

3. Pengadaan Bahan dan Materi Keterampilan bagi Pencari Kerja

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Materi dan Bahan
Pelatihan Keterampilan

4. Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Peralatan yang
diadakan untuk pelatihan
keterampilan tenaga kerja

10. Peningkatan Kesempatan Kerja

Indikator Kinerja : Prosentase Peningkatan Kesempatan Kerja

Kegiatan :

1. Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Bantuan Kelompok
Usaha Produktif (KUP)

2. Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja

Indikator Kinerja Kegiatan : Penyusunan Informasi Pencari
Kerja dan Lowongan Kerja

3. Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Informasi Pasar Kerja
Kepada Pencari Kerja

4. Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Pembinaan Ketenaga
Kerjaan di Lembaga
Pendidikan

5. Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah tenaga yang siap pakai

6. Pengembangan Produktifitas dan Pelatihan Kewirausahaan

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Tenaga kerja
berwirausaha

**11. Program Perlindungan dan pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan**

Indikator Kinerja : - Pronsetase Penyelesaian Kasus HI
(Hubungan Industrial)

Kegiatan :

1. Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan penegakkan
Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Sosialisasi tentang
perlindungan dan penegakkan
Hukum

2. Monitoring dan Evaluasi

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Perusahaan yang telah
membuat peraturan
perusahaan, mengikutsertakan
pekerja pada Jaminan Sosial

Tenaga Kerja, pelaksanaan
UMP dan hubungan Kerja

3. Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang
Ketenagakerjaan

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Peserta Sosialisasi
Peraturan Pelaksanaan tentang
ketenagakerjaan

4. Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan
hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Kasus perselisihan HI
yang diselesaikan

5. Pemantauan kinerja lembaga penyalur tenaga kerja

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Pelaporan dan
Pemantauan Kinerja Lembaga
Penyalur Tenaga Kerja

Untuk Program Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif dapat dilihat pada lampiran
**Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok
Sasaran, dan Pendanaan Indikatif**

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Kegiatan yang dilaksanakan :

- Pengembangan Potensi Unggulan

Indikator Kinerja Kegiatan : Tersedianya informasi potensi, peluang investasi unggulan

- Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengendalian Pelaksanaan PMDN / PMA

Indikator Kinerja Kegiatan : Terlaksananya Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan PMDN/PMA

- Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Indikator Kinerja Kegiatan : Terlaksananya Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

- Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi

Indikator Kinerja Kegiatan : Tersedianya SDM dibidang Penanaman Modal

- Penyelenggaraan Pameran Investasi

Indikator Kinerja Kegiatan : Terlaksananya Pameran dalam negeri

- Koordinasi perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal

Indikator Kinerja Kegiatan : Terlaksananya Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Dengan beberapa kegiatan sebagai berikut :

- Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal

Indikator Kinerja Kegiatan : Tersediannya Sistem Informasi Penanaman Modal dan PTSP

- Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal

Indikator Kinerja Kegiatan : Tersedianya Kemudahan Prosedur Pelayanan Perizinan dan Pelayanan Penanaman Modal

- Penyusunan Kebijakan Bagi Fasilitas Infrastruktur

Indikator Kinerja Kegiatan : Tersedianya kebijakan bagi fasilitas infrastruktur

- Monitoring dan Evaluasi

Indikator Kinerja Kegiatan : Teridentifikasinya tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan perizinan

Program Optimalisasi teknologi Informasi

Dengan Kegiatan sebagai berikut :

- Penyusunan Sistem Informasi Pelayanan Publik

Indikator Kinerja Kegiatan : Tersedianya Sistem Pelayanan Perizinan

Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

Dengan Kegiatan Sebagai Berikut :

- Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja

Indikator Kinerja Kegiatan : Tersedianya Tenaga Kerja yang terampil dan mandiri

- Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan : Tersedianya Dokumen Ketenagakerjaan Daerah (Database)

- Pengadaan Bahan dan Materi Keterampilan bagi Pencari Kerja

Indikator Kinerja Kegiatan : Tersedianya Materi dan Bahan Pelatihan Keterampilan

- Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja

Indikator Kinerja Kegiatan : Tersedianya Peralatan yang diadakan untuk pelatihan keterampilan tenaga kerja

Peningkatan Kesempatan Kerja

Dengan Kegiatan sebagai berikut :

- Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat
Indikator Kinerja Kegiatan : Tersedianya Bantuan Kelompok Usaha Produktif (KUP)
- Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja
Indikator Kinerja Kegiatan : Tersusunnya Data Informasi Pencari Kerja dan Lowongan Kerja
- Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
Indikator Kinerja Kegiatan : Tersedianya Informasi Pasar Kerja Kepada Pencari Kerja
- Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan
Indikator Kinerja Kegiatan : Terlaksananya Pembinaan Ketenaga Kerjaan di Lembaga Pendidikan
- Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai
Indikator Kinerja Kegiatan : Tersedianya tenaga yang siap pakai
- Pengembangan Produktifitas dan Pelatihan Kewirausahaan
Indikator Kinerja Kegiatan : Tersedianya Tenaga kerja berwirausaha

Program Perlindungan dan pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Dengan Kegiatan sebagai berikut :

- Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan penegakkan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Indikator Kinerja Kegiatan : Terlaksananya Sosialisasi tentang perlindungan dan penegakkan Hukum

- Monitoring dan Evaluasi

Indikator Kinerja Kegiatan : Tersedianya Perusahaan yang telah membuat peraturan perusahaan, mengikutsertakan pekerja pada Jaminan Sosial Tenaga Kerja, pelaksanaan UMP dan hubungan Kerja

- Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan

Indikator Kinerja Kegiatan : Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

- Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan

Indikator Kinerja Kegiatan : Terlaksananya Kasus perselisihan HI yang diselesaikan

- Pemantauan kinerja lembaga penyalur tenaga kerja

Indikator Kinerja Kegiatan : Tersedianya Pelaporan dan Pemantauan Kinerja Lembaga Penyalur Tenaga Kerja

Untuk Indikator Kinerja Skpd Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada Lampiran **TABEL 7.1 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.**

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021 memuat hal-hal penting terhadap pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan tidak bersifat kaku serta senantiasa memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021 merupakan panduan dan implementasi beberapa perubahan yang terjadi terutama terhadap struktur organisasi dan uraian tugas Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja kabupaten Bone Bolango. Rencana strategis ini merupakan panduan dalam menentukan strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta berbagai dasar untuk melakukan evaluasi dan pelaporan pencapaian tujuan dan sasaran.

Untuk melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, komitmen dan disiplin dari seluruh aparatur Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja kabupaten Bone Bolango, karena hal ini akan menentukan keberhasilan program kegiatan yang telah direncanakan. Dokumen Renstra ini merupakan cermin dari tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders dan merupakan salah satu tindaklanjut pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja kabupaten Bone Bolango ini, diharapkan dapat mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan baik dari internal maupun eksternal organisasi.

Semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian Visi Kabupaten Bone Bolango 2016-2021 yaitu ***“Terwujudnya Bone Bolango Cemerlang”***.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

249,999
24999
14.627.498,00

20%

TABEL 7.1
Indikator Kinerja Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Program dan Kegiatan	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode
				Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	
	(1)	(4)	(5)	(7)	(9)	(11)	(13)	(15)	
	Outcome	Program							
	Meningkatnya Promosi dan Kerjasama Investasi Daerah	Program peningkatan promosi dan kerjasama Investasi							
	Jumlah Buku Profil Promosi Potensi Unggulan Daerah yang Dibuat	Kegiatan : Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	50 Buku Profil	50 Buku Profil	75 Buku Profil	75 Buku Profil	100 Buku Profil	100 Buku Profil	100 Buku Profil
	Jumlah Peserta Rakor PMA, PMDN	Kegiatan : Koordinasi Antar Lembaga dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang
	Jumlah Perusahaan PMA, PMDN yang diawasi	Kegiatan : Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	30 Perusahaan	30 Perusahaan	35 Perusahaan	40 Perusahaan	45 Perusahaan	50 Perusahaan	50 Perusahaan

	Terlaksananya Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi							
	Tersedianya Sistem Pelayanan Perizinan	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	1 Software / 5 unit	1 Software / 5 unit	0	0	0	0	1 Software / 5 unit
	Prosentase Pencari kerja yang telah memiliki sertifikat dan berkompetensi	Program : Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Tenaga Kerja yang mengikuti pelatihan	Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	25 Orang	0	5% dari 500 Pencaker = 25 Orang	30% dari 500 Pencaker = 150 Orang	32% dari 500 Pencaker = 160 Orang	33% dari 500 Pencaker = 165 Orang	500 Orang
	Prosentase Tenaga Kerja mandiri	Program : Peningkatan Kesempatan Kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Peserta Bimtek Kelompok usaha Produktif dan yang difasilitasi	Kegiatan : Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat	25 Orang	0	3% dari 600 Pencaker = 15 Orang	25% dari 600 Pencaker = 150 Orang	33% dari 600 Pencaker = 200 Orang	39% dari 600 Pencaker = 235Orang	600 Orang

	Jumlah Peserta Sosialisasi Pembinaan Ketenaga Kerjaan di Lembaga Pendidikan	Kegiatan : Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan	0	0	0	450 Orang	450 Orang	450 Orang	450 Orang
	Pronsetase Perlindungan dan pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Program Perlindungan dan pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan			40%	60%	80%	100%	100%
	Jumlah Perusahaan yang mengikuti sosialisasi tentang BPJS Ketenagakerjaan	Kegiatan : Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan penegakkan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja	0	0	25 Orang	50 Orang	75 Orang	100 Orang	250 Orang
	Jumlah Tenaga kerja yang mengikuti sosialisasi tentang Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan (Hubungan Industrial)	Kegiatan : Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan	0	0	25 Orang	50 Orang	75 Orang	100 Orang	250 Orang
	Prosentase Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	0	0	0	100%	100%	100%	100%
	Jumlah sarana dan prasarana ekonomi dalam peningkatan taraf hidup masyarakat dengan sosialisasi pengembangan ekonomi	Kegiatan : Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi	0	0	0	1 Paket	1 Paket	1 Paket	3 Paket

249,999
24999
14.627.498,00

20%

13%

24%

16%

100%

TABEL 6. 1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
pelayanan administrasi perkantoran diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar kantor agar kegiatan pelayanan publik berjalan dengan baik dan lancar	Peningkatan pelayanan adminsitration perkantoran		Program : Pelayanan administrasi perkantoran	Prosentase cakupan layanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100%	100%	507.012.000	100%	532.362.600	100%	683.104.118	100%	717.259.323	100%	753.122.290	100%	3.192.860.330	DPMPTS P&TK	DPMPTS P&TK
			Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Belanja Operasional Layanan Administrasi Perkantoran		12 Bulan	442.149.000	12 Bulan	464.256.450	12 Bulan	557.107.740	12 Bulan	584.963.127	12 Bulan	614.211.283	60 Bulan	2.662.687.600		
			Kegiatan : kegiatan rapat-rapat dan konsultasi kedalam dan ke luar daerah	Jumlah Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi kedalam dan keluar daerah yg diikuti		12 Bulan	64.863.000	12 Bulan	68.106.150	12 Bulan	125.996.378	12 Bulan	132.296.196	12 Bulan	138.911.006	60 Bulan	530.172.730		

Perlengkapan sarana dan prasarana aparatur merupakan fasilitas penunjang untuk meningkatkan kinerja pegawai. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai instansi yang melaksanakan pelayanan publik	Sarana dan Prasaran Perkantoran	Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase pemanfaatan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan peruntukannya	100%	100%	362.081.000	100%	380.185.050	100%	399.194.303	100%	419.154.018	100%	440.111.720	100%	2.000.726.091	DPMPTS P&TK	DPMPTS P&TK
		Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas dan operasional lapangan		10 Unit	125.081.000	14 Unit	143.185.050	16 unit	140.000.000	18 Unit	134.040.285	18 Unit	140.742.300	18 Unit	683.048.635		
		Kegiatan : Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor		8 Unit	237.000.000	9 Unit	237.000.000	10 Unit	259.194.303	10 Unit	285.113.733	10 Unit	299.369.420	47 Unit	1.317.677.456		
Meningkatnya disiplin aparatur pada	Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur	Program Peningkatan disiplin aparatur	Prosentase peningkatan disiplin aparatur	100%	100%	19.050.000	100%	29.725.000	100%	113.800.000	100%	119.490.000	100%	125.464.500	100%	407.529.500	DPMPTS P&TK	
		Kegiatan : pengadaan pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Jumlah Aparatur yang mendapatkan pakaian dinas dan pakaian khusus hari-hari		30 Orang	9.550.000	41 Orang	11.000.000	80 Orang	56.000.000	80 Orang	58.800.000	80 Orang	61.740.000	80 Orang	197.090.000		
		Kegiatan : Pengadaan pakaian khusus dan hari-hari tertentu	Jumlah Aparatur yang mendapatkan pakaian khusus dan pakaian khusus hari-hari		38 Orang	9.500.000	45 Orang	9.975.000	80 Orang	28.900.000	80 Orang	30.345.000	80 Orang	31.862.250	80 Orang	110.582.250		
		Kegiatan : Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Aparatur yang mendapatkan pakaian dinas Kerja Lapangan		0	-	60 Orang	8.750.000	80 Orang	28.900.000	80 Orang	30.345.000	80 Orang	31.862.250	80 Orang	99.857.250		

Meningkatnya kapasitas SDM aparatur	Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur yang berkompoten	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase capaian ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100%	100%	60.792.000	100%	63.831.600	100%	100.000.000	100%	105.000.000	100%	110.250.000	100%	439.873.600	DPMPTS P&TK	
		Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		5 Orang	60.792.000	5 Orang	63.831.600	5 Orang	100.000.000	5 Orang	105.000.000	5 Orang	110.250.000	25 Orang	439.873.600		
Meningkatnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terwujudnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Prosentase ketersediaan dokumen hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan rekomendasi pelaksanaan tahun berikutnya	100%	100%	31.950.000	100%	33.547.500	100%	36.288.000	100%	38.102.400	100%	40.007.520	100%	179.895.420	DPMPTS P&TK	
		Kegiatan : Penyusunan laporan capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD		6 Dokumen	20.250.000	6 Dokumen	21.262.500	6 Dokumen	23.388.750	6 Dokumen	24.558.188	6 Dokumen	25.786.097	30 Dokumen	115.245.534		
		Kegiatan : Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang dibuat		2 Laporan	11.700.000	0	12.285.000	2 Laporan	12.899.250	2 Laporan	13.544.213	2 Laporan	14.221.423	8 Laporan	64.649.886		
Meningkatnya kualitas pelayanan bagi pelaku usaha	Meningkatnya nilai investasi	Program peningkatan promosi dan kerjasama Investasi	Persentase nilai investasi awal Persentase nilai realisasi	10%	5%	236.790.000	6%	183.781.500	7%	643.499.300	8%	836.424.265	10%	314.655.251	10%	648.539.000	DPMPTS P&TK	DPMPTS P&TK
		Kegiatan : Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Jumlah Buku Profil Promosi Potensi Unggulan Daerah yang Dibuat	Buku Profil	50 Buku Profil	36.675.000	75 Buku Profil	38.508.750	75 Buku Profil	130.000.000	100 Buku Profil	143.000.000			400 Buku Profil	505.483.750		
			Jlh pameran yang diikuti	2 pameran	0	-	0	-	0	-	0	-	2pameran	55.250	2pameran	55.250		
			Jlh laporan pendataan potensi investasi	1 Laporan	0	-	0	-	0	-	0	-	1Laporan	-	1 Laporan	-		
			Jlh buku profil potensi investasi	1 Buku	-	-	-	-	-	-	-	-	100 Buku Profil	157.300.000	100 Buku Profil	143.000.000		

				Jlh pelaku usaha yang masuk	4 Dokumen	0	-	0	-	0	-	0	-	4 Dokumen	-	4 Dokumen	-
				Jlh data pelaku usaha	4Dokumen	0	-	0	-	0	-	0	-	5 Dokumen	1	5 Dokumen	-
			Kegiatan : Koordinasi Antar Lembaga dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA	Jumlah Peserta Rakor PMA, PMDN	50 Orang	50 Orang	45.795.000	50 Orang	48.084.750	0	-	0	-	0	-	0	-
				Jlh data laporan LKPM	4 Laporan	0	-	0	-	0	-	0	-	4 Laporan	-	4 Lap	-
				Jlh laporan realisasi PM	4 Laporan	0	-	0	-	0	-	0	-	4 Laporan	-	4 Lap	-
			Kegiatan : Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan PMA, PMDN yang diawasi	30 Perusahaan	30 Perusahaan	38.240.000	35 Perusahaan	40.152.000	40 Perusahaan	150.000.000	45 Perusahaan	157.500.000	0	-	0	-
			Kegiatan : Pengawasan dan Evaluasi Kinerja dan Aparatur Badan Penanaman Modal Daerah	Jumlah Pengaduan PMA, PMDN, dan Non PMDN	1 Kegiatan	2 Kegiatan	61.760.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-
			Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi	Jumlah Peserta Bimtek Penanaman Modal	3 Orang	5 Orang	34.920.000	5 Orang	36.666.000	5 Orang	38.499.300	5 Orang	40.424.265	0	-	0	-
			Kegiatan : Penyelenggaraan Pameran Investasi	Jumlah Pameran yang diikuti	2 Pameran	2 Pameran	19.400.000	2 Pameran	20.370.000	2 Pameran	50.000.000	2 Pameran	52.500.000	0	-	0	-
			Kegiatan : Koordinasi perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan antara investor dan pemerintah		0	-	0	-	1 Kali Kegiatan Temu Investor	275.000.000	1 Kali Kegiatan Temu Investor	300.000.000	0	-	-	-

Mendorong terciptanya tenaga kerja yang berkompentensi dan memiliki jaminan perlindungan	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka		Program : Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Prosentase Pencari kerja yang telah memiliki sertifikat dan berkompentensi	100%	0%	Rp -	100%	Rp 100.000.000	100%	Rp 270.000.000	100%	Rp 297.000.000	100%	Rp 326.700.000	100%	Rp 993.700.000		DPMPTS P&TK	DPMPTS P&TK
				Persentase Tenaga Kerja mandiri yang dilatih dan telah memiliki sertifikat & berkompentensi	0%	0%	Rp -	0%	Rp -	0%	Rp -	0%	Rp -	100%	Rp -	100%	Rp -			
			Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang mengikuti pelatihan	0	-	5% dari 500 Pencaker = 25 Orang	Rp 100.000.000	30% dari 500 Pencaker = 150 Orang	Rp 270.000.000	32% dari 500 Pencaker = 160 Orang	Rp297.000.000	33% dari 500 Pencaker =165 Orang	Rp326.700.000	500 Orang	Rp993.700.000				
			Program : Peningkatan Kesempatan Kerja	Prosentase Tenaga Kerja mandiri	100%	0%	Rp -	100%	Rp 100.000.000	100%	Rp 570.000.000	100%	Rp 627.000.000	0%	Rp -	100%	Rp 1.297.000.000		DPMPTS P&TK	DPMPTS P&TK
			Kegiatan : Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat	Jumlah Peserta Bimtek Kelompok usaha Produktif dan yang difasilitasi	0	-	3% dari 600 Pencaker = 15 Orang	Rp 100.000.000	25% dari 600 Pencaker =150 Orang	Rp 470.000.000	33% dari 600 Pencaker = 200 Orang	517.000.000	0	-	600 Orang	1.087.000.000				
			Kegiatan : Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Peserta Sosialisasi Pembinaan Ketenaga Kerjaan di Lembaga Pendidikan	0	-	0	-	450 Orang	Rp 100.000.000	450 Orang	110.000.000	0%	-	450 Orang	210.000.000				
	Meningkatnya tenaga kerja formal informal yang difasilitasi menjadi peserta JPTK		Program Perlindungan dan pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Prosentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	40%	0%	Rp -	40%	Rp 100.000.000	60%	Rp 200.000.000	80%	Rp 125.000.000	100%	Rp 125.000.000	60%	Rp 550.000.000		DPMPTS P&TK	
				Persentase perusahaan yang membuat laporan ketenaga kerjaan	0%	0%	Rp -	0%	Rp -	0%	Rp -	0%	Rp -	100%	Rp -	100%	Rp -			

			Kegiatan : Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan penegakkan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Jlh peserta yang mengikuti sosialisasi	0	-	25 Orang	Rp 50.000.000	50 Orang	100.000.000	400 Orang	125.000.000	500 Orang	125.000.000	800Org	400.000.000		
				Jlh TK formal informal yang dilindungi	0	0	-	0%	Rp -	0	-	0	-	20 Rb peserta BPJS	20 Rb peserta BPJS			
				Persentase Penyelesaian perselisihan HI	0%	0	-	0%	Rp -	0	-	0	-	100%	100%			
				Jlh TK & Perusahaan yg ikut sosialisasi ttg peraturan pelaksanaan ketenagakeriaan	0	0	-	0%	Rp -	0	-	0	-	100 Orang	100 Orang			
				Jlh perusahaan yg melaporkan perkembangan ketenagakeriaan	0	0	-	0%	Rp -	0	-	0	-	6 Laporan	6 Laporan			
			Kegiatan : Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga kerja yang mengikuti sosialisasi tentang Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakeriaan	0	-	25 Orang	Rp 50.000.000	50 Orang	Rp 100.000.000	0	-	0%	-	380 Orang	150.000.000		
			Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Prosentase Pengembangan Wilayah Transmigrasi	0	-	0	-	100%	Rp 150.000.000	100%	157.500.000	0%	165.375.000	100%	472.875.000		
			Kegiatan : Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi	Jumlah sarana dan prasarana ekonomi dalam peningkatan taraf hidup masyarakat dengan sosialisasi pengembangan ekonomi	0	-	0	-	1 Paket	Rp 150.000.000	1 Paket	Rp 157.500.000	0%	Rp -	3 Paket	307.500.000		

249,999
24999
14.627.498,00

57.800.000

20%

13%

24%

16%

100%

PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
TAHUN 2019

